

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk memajukan aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan harapan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, dan mengurangi angka pengangguran. Masalah yang timbul adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, yang menyebabkan tenaga kerja tidak dapat diakomodasi di pasar kerja. Akibatnya angka pengangguran pun meningkat karena adanya ketidakseimbangan tersebut (Afifah Rizkia & Ria Haryatiningsih, 2023).

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan klasik yang dihadapi oleh hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. Permasalahan ini menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Permasalahan yang ada pada pengangguran terdidik saling berkaitan dengan masalah tenaga Pendidikan, mutu Pendidikan yang sering terjadi pada negara berkembang (Harahap & Akmal Yusuf, 2025).

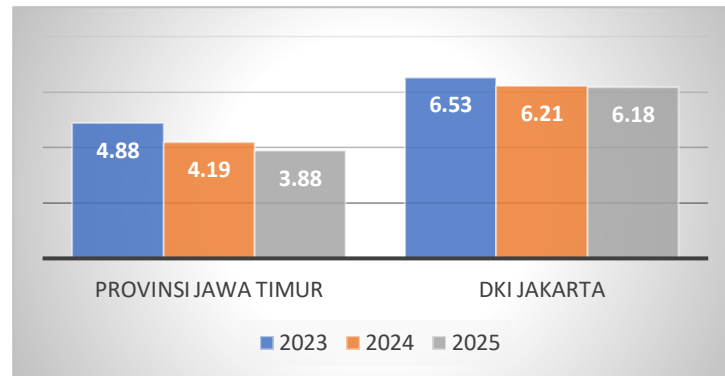
Meningkatnya jumlah pencari kerja yang meningkat menjadi masalah jika tidak diimbangi dengan terbukanya lapangan pekerjaan yang memadai. Jumlah pengangguran terdidik didominasi oleh lulusan SLTA/Kejuruan dan lulusan perguruan tinggi yang menunjukkan bahwa terjadinya penurunan produktivitas sumber daya manusia, yang seharusnya sumber daya manusia dapat dimanfaatkan

dengan benar, karena sumber daya manusia adalah salah satu pelaku dalam pembangunan ekonomi, yang seharusnya permasalahan ini harus diperhatikan dengan serius (Risky Alif Setyawan, 2023). Namun pada umumnya lulusan SD, SMP, maupun tidak sekolah juga banyak yang termasuk terdidik, namun secara tersirat, seperti mereka yang mampu mengembangkan diri sendiri seperti contoh mereka yang sukses karena kemampuan berbisnisnya.

Terjadinya pengangguran yang tinggi disebabkan adanya angkatan kerja yang tinggi, laju pertumbuhan ekonomi yang lemah juga menyebabkan pengangguran yang tinggi sehingga harus diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil/meningkat, karena semakin tinggi laju pertumbuhann ekonomi di suatu daerah akan mendorong perusahaan untuk beroperasi sehingga aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi akan mengikuti pergerakan yang meningkat (Auliya & Agusalim, 2022).

Pengangguran terdidik adalah kondisi dimana tenaga kerja yang sulit dan menunggu mendapatkan pekerjaan, bukan hanya karena suatu perusahaan yang tidak mau menerima mereka atau tidak membuka lapangan pekerjaan, tetapi tenaga kerja terdidik banyak yang selektif dalam mencari pekerjaan (Risky Alif Setyawan, 2023). Lulusan terdidik lebih memilih menunggu waktu yang lebih lama (menanggur) untuk mendapatkan pekerjaan daripada mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai, seperti dari aspek penerimaan upah (Harahap & Akmal Yusuf, 2025).

Gambar 1.1 perbandingan tingkat pengangguran antara provinsi jawa timur dan DKI Jakarta



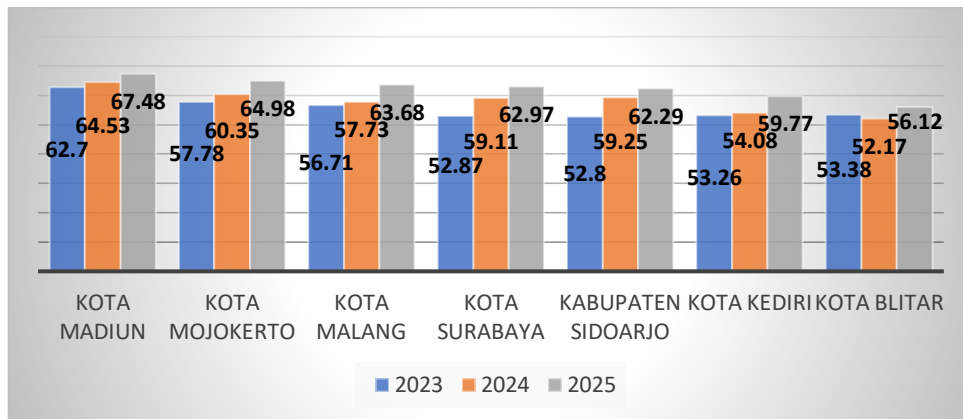
Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Pada gambar 1.1 menunjukkan selama tahun 2023 hingga 2025 pengangguran di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan. Sebaliknya DKI Jakarta memiliki pengangguran yang tinggi pada periode 2023 hingga 2025, perbedaan ini menunjukkan DKI Jakarta merupakan kota dengan pusat kegiatan ekonomi, tekanan pasar kerja di kota metropolitan menunjukkan lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi yang berbasis ekonomi regional seperti Jawa Timur. Kondisi ini terjadi karena banyak lulusan berpendidikan tinggi yang masuk ke pasar kerja sehingga penyerapannya tidak merata. Akibatnya terjadi persaingan yang ketat di tenaga kerja terdidik (Aulia Anandita Putri & Boedirochminarni, 2025).

Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu wilayah dengan dinamika pasar tenaga kerja yang cukup kompleks. Meskipun pertumbuhan ekonomi di provinsi ini terus menunjukkan perkembangan positif, namun tidak seluruhnya diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal, terutama bagi kelompok terdidik. Sumber data dari BPS beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur seperti Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Blitar, termasuk wilayah dengan tingkat pengangguran terdidik yang relatif tinggi.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dalam menciptakan kesempatan kerja bagi lulusan berpendidikan (Ramadhan dkk, 2024).

Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terdidik Pada 7 Wilayah di provinsi Jawa Timur



Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

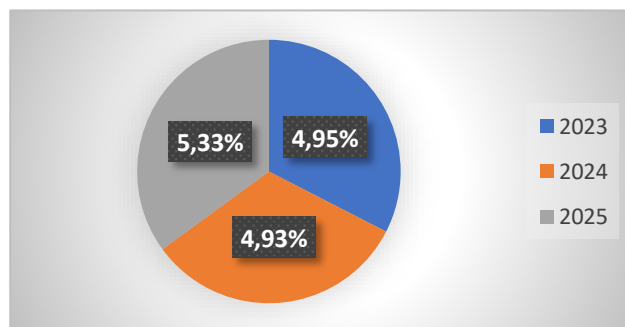
Berdasarkan gambar 1.2, pengangguran terdidik mengalami peningkatan tingginya pertumbuhan lulusan sekolah dan perguruan tinggi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja formal. Selain itu terkadang perusahaan mencari pekerja yang sudah memiliki pengalaman sehingga banyak lulusan baru yang belum terserap, dan di perburuk dengan adanya *skill mismatch* antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pada era zaman digital banyak pekerjaan administratif yang digantikan dengan teknologi sehingga lapangan pekerjaan lebih terbatas.

Perbedaan tingkat pengangguran terdidik di setiap wilayah memperlihatkan terdapat kemampuan penyerapan tenaga kerja yang kurang merata. Kabupaten/Kota dengan aktifitas industri dan jasa yang tinggi tidak selalu diimbangi dengan rendahnya pengangguran terdidik. Karena persaingan tenaga kerja yang kompeten

lebih ketat, dengan kata lain peningkatan penduduk yang berpendidikan tidak selalu diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai. Yang seharusnya lulusan terdidik ini mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi (Neti dkk, 2024).

Pertumbuhan ekonommi juga memiliki peran penting. Menurut Arisusanti, (2023), pertumbuhan ekonomi seharusnya berperan dalam menurunkan angka pengangguran, termasuk dikalangan terdidik, karena peningkatan aktivitas ekonomi dapat memperluas lapangan kerja. Namun hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terdidik tidak selalu searah, Karena dalam kondisi tertentu, peningkatan output ekonomi dapat terjadi tanpa diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

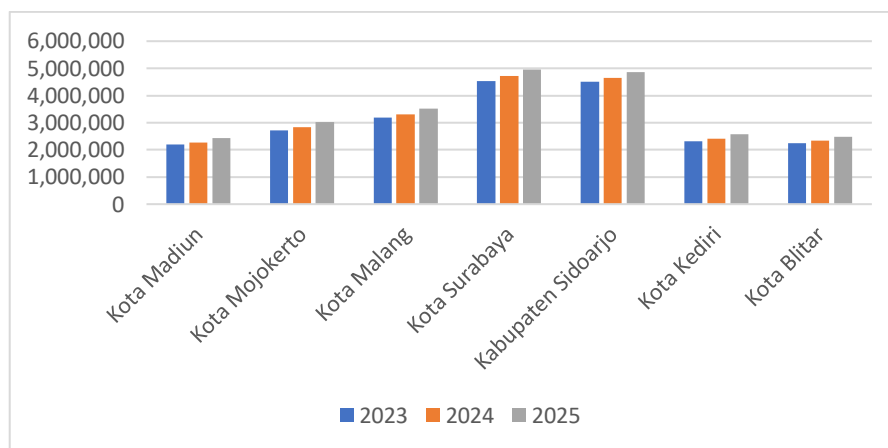


Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan gambar 1.3 pertumbuhan ekonomi memiliki tren yang stabil dan meningkat pada tahun 2025, ini megindikasikan bahwa aktivitas ekonomi bergerak positif pasca pandemi. Hal ini harus di imbangi dengan kontribusi lulusan terdidik agar kesejahteraan seimbang, walaupun masih ada terjadinya *mismatch* yang memperparah pengangguran terdidik.

Selain itu, faktor upah minimum kabupaten/kota (UMK) juga berpotensi memengaruhi tingkat pengangguran terdidik. Kenaikan upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun pada saat yang sama dapat menurunkan daya serap tenaga kerja apabila produktivitas tidak meningkat sebanding dengan kenaikan upah (Afifah Rizkia & Ria Haryatiningsih, 2023).

Gambar 1.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota



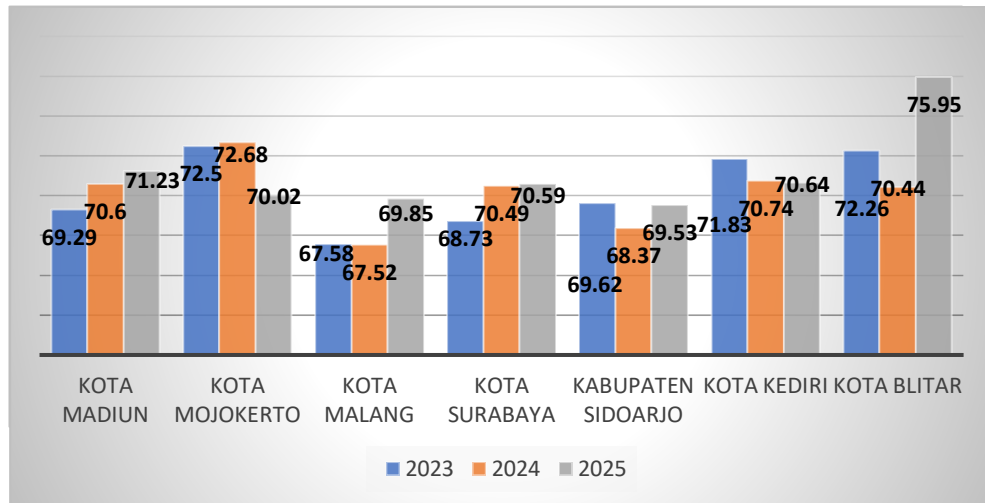
Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Gambar 1.4 menunjukkan peningkatan upah pada setiap tahunnya, mencerminkan adanya upaya pemerintah dalam penyesuaian upah dengan kebutuhan hidup yang layak. Peningkatan upah ini memiliki sisi kesejahteraan bagi tenaga kerja. Namun memiliki sisi beban biaya produksi bagi perusahaan yang berpotensi mengurangi penyerapan tenaga kerja baru, terutama bagi angkatan kerja usia muda (Ramadhan & Rozaini, 2023).

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Meningkatnya partisipasi angkatan kerja menunjukkan semakin banyak penduduk usia produktif yang bersedia bekerja, namun apabila tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja, hal ini justru dapat meningkatkan jumlah

pengangguran, termasuk di kalangan tenaga kerja berpendidikan tinggi (Ramadhan dkk, 2024).

Gambar 1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

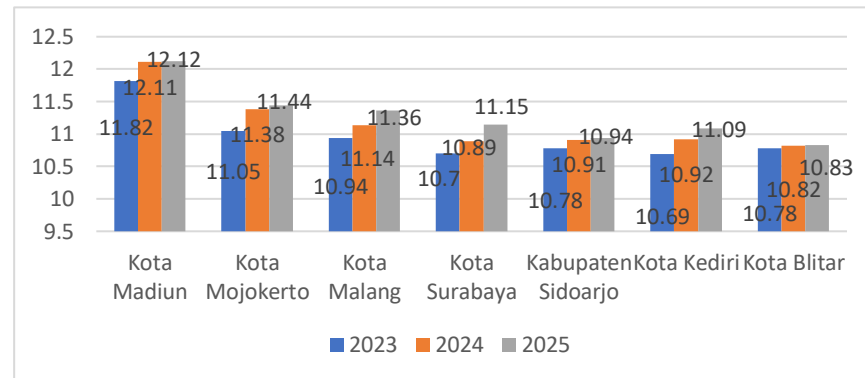


Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Pada gambar 1.5 menunjukkan antusiasme yang tinggi dari Kota Blitar lulusan terdidik aktif dalam mencari pekerjaan. tingginya partisipasi angkatan kerja akan menurunkan pengangguran jika apabila diikuti dengan penciptaan kesempatan kerja yang sesuai dengan kualitas dan keterampilan lulusan (Sianturi dkk, 2024).

Hal ini menunjukkan gambaran yang positif bagi pembangunan ekonomi, karena masyarakat menunjukkan kesadaran dalam bekerja dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif dalam roda perekonomian di Indonesia.

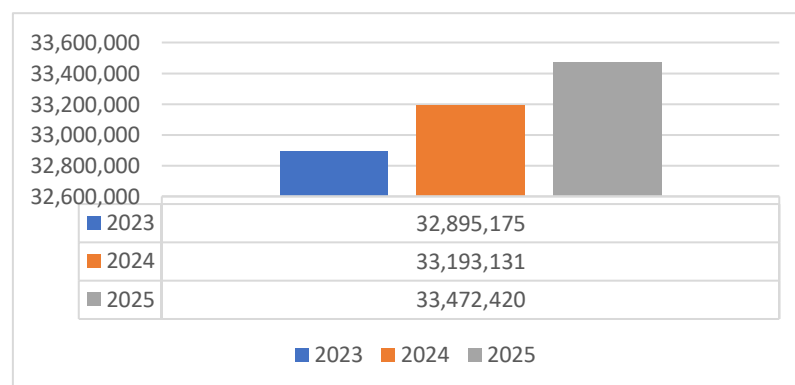
Gambar 1.6 Rata-Rata Lama Sekolah di 5 Wilayah Provinsi Jawa Timur



Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Pada gambar 1.6 pendidikan adalah kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk bersaing. Pada gambar diatas rata rata masyarakat jawa timur cenderung menempuh Pendidikan 10 tahun, hal ini menunjukkan lamanya menempuh Pendidikan formal atau setara dengan jenjang SMA/Sederajat. Menurut (Anjarwati & juliprijanto, 2021) tingginya tingkat Pendidikan tidak selalu menjamin terserapnya tenaga kerja ke dalam pasar kerja jika terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja.

Gambar 1.7 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Provinsi Jawa Timur



Sumber: Data Diolah Peneliti, 2026

Pada gambar 1.7 usia pada angkatan kerja sangat mempengaruhi peluang pekerjaan yang didapatkan. Seseorang yang memiliki umur berkirsan 15 hingga 64 tahun dianggap sebagai periode yang penuh potensi atau memiliki umur

produktivitas yang tinggi, seperti pada gambar 1.7 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 hingga 2025 memiliki trend naik yang menunjukkan bahwa meningkatnya individu yang memiliki umur produktif di pasar kerja. Namun masalah yang terjadi pada saat ini banyak perusahaan yang memberikan Batasan maksimal. Bagi lulusan terdidik, bertambahnya umur jika tidak diiringi dengan bertambahnya pengalaman menjadi satu masalah yang menimbulkan stigma negatif di mata pemberi pekerja. Di sisi lain mereka mempunyai akademis yang tinggi namun disisi lain peluang akses ke pasar tenaga kerja semakin menyempit seiring dengan melampaunya ambang batas usia produktif.

Meskipun telah menempuh pendidikan formal yang tinggi. Namun Pengangguran terdidik justru di dominasi oleh kalangan muda karena kurangnya pengalaman pekerjaan. Yang masih membutuhkan dukungan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan, agar mengurangi ketidaksesuaian keterampilan dan kebutuhan pasar kerja (Rokhim dkk, 2024).

Lulusan terdidik juga yang diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan justru terjebak pada pengangguran terdidik. Kondisi ini menjadi masalah bagi pemerintah karena mencerminkan belum maksimalnya pemerintah dalam memperluas pertumbuhan ekonomi dan kurangnya keberhasilan dalam menerapkan sistem pendidikan yang tidak hanya mengandalkan akademik saja tetapi mengembangkan kompetensi diri atau melatih kemampuan untuk bersaing di dunia kerja.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan partisipasi tenaga kerja terhadap

tingkat pengangguran di berbagai daerah di Indonesia. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik menyoroti pengangguran terdidik di tingkat kota di Jawa Timur serta faktor mikro seperti Rata-Rata Lama Sekolah dan usia, khususnya pada wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi.

Hasil dari penelitian terdahulu, pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap jumlah pengangguran terdidik, karena hasilnya selaras dengan hukum *okun's law* yang berarti ketika terjadi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi maka akan menurunkan jumlah pengangguran terdidik. dengan kata lain produksi juga membutuhkan tenaga kerja lebih banyak untuk menghasilkan output barang dan jasa (Neti dkk, 2024).

Hasil dari penelitian terdahulu, UMK berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terdidik, karena naiknya upah yang menyebabkan meningkatnya pengangguran terdidik karena ketika pemerintah menaikkan upah perusahaan biasanya memilih mengurangi tenaga kerja untuk mengurangi defisit. (Guritno & Muljaningsih, 2023).

Hasil dari penelitian terdahulu, tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran terdidik. lulusan terdidik yang aktif dalam pasar tenaga kerja baik mencari pekerjaan, pelatihan, mengikuti kesempatan informal memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. TPAK juga mencerminkan pada usia produktif yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi (Adela Yunensy & Nurjannah Rahayu Kistanti, 2025).

Hasil dari penelitian terdahulu, rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, karena terdapat ketidaksesuaian antara kesempatan kerja dan kualifikasi SDM yang tersedia. Artinya jika SDM telah meningkat namun belum memenuhi kebutuhan permintaan tenaga kerja dan kualifikasi kebutuhan lapangan pekerjaan seperti pengalaman dan *softskill* (Vanesa, 2023).

Hasil dari penelitian terdahulu, usia memiliki pengaruh positif dan signifikan, karena semakin tinggi usia dari individu maka kemungkinan untuk menjadi pengangguran terdidik semakin tinggi jika dibandingkan dengan individu yang berusia lebih muda memiliki produktivitas tinggi dan kondisi fisik yang tergolong baik (Fahreza, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran terdidik di Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Blitar di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah upah minimum kabupaten/kota berpengaruh terhadap pengangguran terdidik di Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Blitar di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh terhadap pengangguran terdidik di Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota

Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Blitar di Provinsi Jawa Timur?

4. Apakah rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap pengangguran terdidik di Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Blitar di Provinsi Jawa Timur?
5. Apakah usia berpengaruh terhadap pengangguran terdidik di Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Blitar di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terdidik di Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Blitar di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap pengangguran terdidik di Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Blitar di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap pengangguran terdidik di Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Blitar di Provinsi Jawa Timur.

4. Untuk mengetahui pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap pengangguran terdidik di Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Blitar di Provinsi Jawa Timur.
5. Untuk mengetahui pengaruh usia terhadap pengangguran terdidik di Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Blitar di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Ruang Lingkup

Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif untuk menguji hubungan antar variabel. Ruang lingkup ini dibatasi pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Timur. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan wilayah Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Blitar di Provinsi Jawa Timur karena memiliki tingkat pengangguran tertinggi di 2025.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi mengenai pengembangan bidang ilmu ekonomi ketenagakerjaan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terdidik di Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Blitar di Provinsi Jawa Timur.
2. Bagi peneliti menambah wawasan pada ilmu ekonomi sebagai dasar pengembangan pengetahuan dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.